

**PIDANA KERJA SOSIAL DAN RELEVANSINYA
DENGAN KONSEP Keadilan Restoratif**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

NABILLA AYU JUNIAR, S.H

NIM : 201710380211007

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Juli 2019

PIDANA KERJA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF

Diajukan oleh:

NABILLA AYU JUNIAR
201710380211007

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/13 Juli 2019

Pembimbing Utama


Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing Pendamping


Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana



Akhmad In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NABILLA AYU JUNIAR

201710380211007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/28 Mei 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
Sekretaris : Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum
Penguji II : Dr. Haris, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 2 pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penyusunan tesis ini, bukan hanya usaha penulis semata, melainkan juga banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berjasa dalam membantu menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Drs. Heru Rudianto, MM dan ibunda tercinta Dra. Lini Pramundari yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan dasar hingga sekarang dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Adik penulis, Hanafi Naufal Rahmadiano yang senantiasa membantu dan menemani dalam penyelesaian tesis ini.
3. Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
4. Mokhammad Najih, Ph.D selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

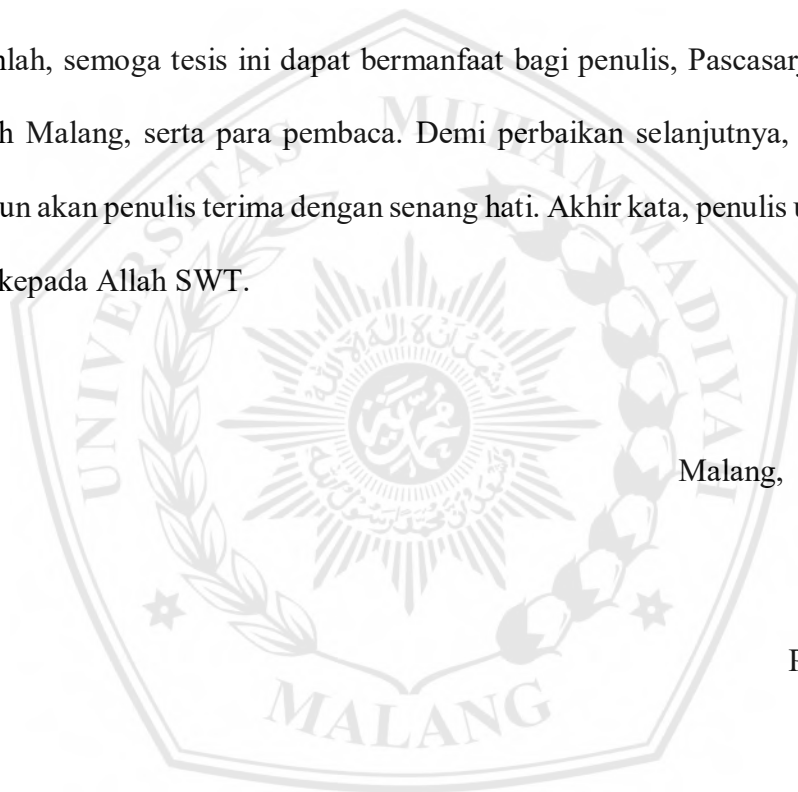
5. Mokhammad Najih, Ph.D selaku Pembimbing 1 dan Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing, memberikan waktu beserta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selama perkuliahan telah memberikan ilmu kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Penyedia Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang dan Perpustakaan Umum Kota Malang yang telah menyediakan referensi untuk terselesaikannya tesis ini.

Demikianlah, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, serta para pembaca. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT.

Malang,

Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Surat Pernyataan.....	v
Abstrak.....	vii
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	4
Tujuan Penelitian.....	4
Kegunaan Penelitian.....	4
Tinjauan Pustaka.....	4
Kerangka Teoritis	
1. Pemidanaan dalam Prespektif Teoritis.....	5
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	8
3. Keadilan Restoratif.....	9
Metodologi Penelitian.....	11
Hasil Penelitian	
1. Urgensi Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	12
2. Konsepsi pidana kerja sosial sebagai pengembangan sistem pemidanaan untuk mendukung konsep keadilan restoratif Kesimpulan dan Saran.....	20
Kesimpulan.....	34
Saran.....	35
Daftar Pustaka	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NABILLA AYU JUNIAR**

NIM : **201710380211007**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PIDANA KERJA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2019

Yang menyatakan,



NABILLA AYU JUNIAR

Abstrak

Nama : Nabilla Ayu Juniar
NIM : 201710380211007
Email : nabillayu17@gmail.com
Pembimbing : 1. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum

NIDN: 0017056501
NIDN: 0013016701

Objek dalam penelitian ini adalah Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, mengetahui konsepsi pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia dan mengetahui alternatif konsepsi pidana kerja sosial sebagai pengembangan sistem pemidanaan untuk mendukung konsep keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembaruan hukum pidana adalah untuk menghadirkan individualisasi pemidanaan yang mendukung tujuan pemidanaan prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restorative dan alternative terhadap pidana penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa semangat penyusunan RKUHP ditujukan untuk mendukung diterapkannya pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana. RKUHP disusun dengan tidak melibatkan korban, bahkan dalam beberapa pasal justru merugikan korban serta berpotensi viktimogen, viktimisasi, dan reviktimisasi. Saran dari penelitian ini adalah pertama, model pidana kerja sosial harus disesuaikan dengan *Ius Constituendum*. Kedua, keberadaan pidana kerja sosial bagi terpidana diharapkan mampu membuat terpidana tersebut hidup secara normal didalam masyarakat. Hal tersebut merupakan beberapa tujuan dari dimunculkannya alternative pemidanaan pidana kerja sosial, oleh karena itu jika konsep atau pedoman penjatuhan pidana kerja sosial masih sama seperti yang ada dalam Pasal 88 RKUHP, maka tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam Pasal 55 tidak sepenuhnya tercapai dan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif seperti yang terdapat dalam Naskah Akademik RKUHP.

Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Tujuan Pemidanaan, Keadilan Restoratif

Abstract

Name : Nabilla Ayu Juniar
NIM : 201710380211007
Email : nabillayu17@gmail.com
Advisors : 1. Mokh. Najih, S.H., M.H., Ph.D
2. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
NIDN: 0017056501
NIDN: 0013016701

The object in this study is Social Work Crime and its relevance to the Concept of Restorative Justice. The purpose of this study is to know the urgency of criminal social work in the renewal of the criminal justice system in Indonesia, to know the criminal conception of social work as an alternative to punishment in Indonesia and to find alternative criminal conception of social work as the development of a criminal system to support the concept of restorative justice. The method used in this study is to use the Normative Juridical approach. Data is obtained using library studies. The data analysis technique used in this study is descriptive qualitative. The results showed that in the Academic Script Draft of the Criminal Code (RKUHP) it was stated that one of the objectives of criminal law reform is to bring criminal individualisation that supports the objective of general, correctional, conflict resolution or guilty convictions, and even the existence of a tendency for regulation of restorative justice and an alternative to imprisonment. So that it can be said that the spirit of the drafting of the Criminal Procedure Code is aimed at supporting the implementation of a restorative justice approach in the settlement of criminal acts. The RKUHP is prepared by not involving victims, even in some articles it harms victims and has the potential for victimization, victimization and revitalization. The advice from this study is first, the criminal model of social work must be adjusted to Ius Constituendum. Second, the existence of criminal social work for convicts is expected to be able to make the convict live normally in the community. This is a number of objectives from the emergence of criminal penalties for social work, therefore if the concept or guideline for the imposition of criminal social work is still the same as that in Article 88 of the Criminal Procedure Code, then the purpose of punishment mentioned in Article 55 is not fully achieved and is not in accordance with the concept restorative justice as found in the RKUHP Academic Paper.

Keywords: Social Work Crime, Purpose of Penalty, Restorative Justice

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Sebagai sebuah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa perlu diperbaharui atau dalam konteks ini pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgent, yaitu sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia. Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹

Pada dasarnya, hukum pidana itu dibangun di atas substansi pokok yaitu: (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pemidanaan. Dalam perkembangannya, pidana dan pemidanaan selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan. Pidana penjara merupakan jenis pidana pokok yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana. Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.² Alasan pidana penjara masih menjadi pidana pokok yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana karena pidana penjara masih dianggap oleh Negara sebagai sanksi pidana yang paling ampuh untuk membuat jera para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya tersebut.

Namun pada kenyataannya, di sisi lain sanksi pidana penjara juga menimbulkan suatu dilema, dikarenakan sejak dahulu sampai saat ini efektifitas dari pidana penjara semakin diragukan. Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik tajam dan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), Hlm. 84 – 86.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994), Hlm. 201-202.

negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).

Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, pidana penjara sudah tidak ditakuti lagi keberadaannya oleh para pelaku tindak pidana. Ruangan penjara para pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bahkan oleh sebagian pelaku tindak pidana diubah menjadi ruangan pribadi yang mewah dilengkapi dengan segala fasilitas yang membuat pelaku seolah-olah tidak berada di dalam penjara, karena pelaku dapat melakukan segala aktifitas yang seharusnya tidak didapatkan di dalam penjara. Permasalahan yang sangat menonjol dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah penuh sesaknya keadaan didalam LAPAS tersebut juga menjadi hal yang sangat disoroti.

Penggantian pidana penjara dalam konteks ini adalah mencari alternative pengganti pidana penjara jangka pendek dengan pidana jenis lain. Setiap negara perlu mencari alternatif pengganti pidana penjara dengan pidana yang lebih bermanfaat sesuai dengan kondisi suatu negara dan lebih banyak melibatkan masyarakat luas, dalam rangka melakukan rehabilitasi bagi pelanggar atau pelaku suatu tindak pidana. Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2018 yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial.**

Pidana kerja sosial sebagai upaya alternatif pidana perampasan kemerdekaan, diharapkan dapat menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana dan dapat menghindarkan terpidana dari dampak negatif seperti kelakuan yang semakin buruk setelah menyelesaikan masa hukuman, adanya pemikiran negatif masyarakat yang menganggap terpidana adalah orang jahat sehingga terpidana tidak dapat bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat dan tidak menutup kemungkinan terpidana tersebut untuk kembali melakukan kejahatan. Keberadaan pidana kerja sosial bagi terpidana diharapkan juga mampu membuat terpidana tersebut hidup secara normal di dalam masyarakat.

Dalam rancangan KUHP khususnya dalam pembaharuan sistem pemidanaan, jika dikaji lebih dalam lagi maka terlihat terdapat pergeseran paradigma pemidanaan yang awalnya bersifat retributif menjadi restoratif. Dalam naskah akademik RKUHP

dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembaharuan hukum pidana adalah untuk menghadirkan individualisasi pemidanaan yang mendukung tujuan pemidanaan prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dimana memiliki arti yaitu merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait (masyarakat) untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan lagi bersifat pembalasan seperti dalam teori retributif.

Penyusunan Rancangan KUHP yang sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung keadilan restoratif justru tidak tergambar dalam rumusan tindak pidana dalam RKUHP. Pidana bukan merupakan satu satunya ukuran keberhasilan (output) melainkan harus diuji sejauh mana ancaman pidana berdampak konstruktif dan positif baik bagi pelaku maupun korban dan masyarakat secara keseluruhan. RKUHP disusun dengan tidak melibatkan korban, bahkan dalam beberapa pasal justru merugikan korban serta berpotensi viktimogen, viktimisasi, dan reviktimisasi. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang seimbang dan partisipasi korban hanya dijadikan sebagai alat bukti tanpa memposisikan korban sebagai subject dalam penyelesaian tindak pidana.

Dalam pembahasan terkait pidana kerja sosial dan relevansinya dengan konsep keadilan restoratif ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu, pertama dengan judul Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia yang membahas mengenai konsep serta proses pidana kerja sosial dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian tersebut menganalisa pidana kerja sosial ditinjau dari prespektif ide pemasyarakatan. Kedua, dengan judul Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana³ yang membahas tentang pergeseran paradigma yang ada dalam hukum pidana yang semula bersifat retributif lalu bergeser menjadi keadilan restoratif.

Guna mengetahui lebih jauh tentang relevansi penetapan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam prespektif pembaharuan, maka penulis menganggap perlu melakukan pengkajian secara lebih mendalam permasalahan pidana kerja sosial ini dengan menjadikan **“Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif”** sebagai judul dalam penulisan tesis ini dan menjadikan kedua penelitian terdahulu yang disebutkan diatas menjadi bahan

³ G Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

perbandingan dalam penulisan tesis ini karena terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan juga terdapat beberapa persamaan terkait teori yang digunakan.⁴

b. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi pidana kerja sosial sebagai pengembangan sistem pemidanaan untuk mendukung konsep keadilan restoratif?

c. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui urgensi pidana kerja sosial dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.
2. Mengetahui konsepsi pidana kerja sosial sebagai pengembangan sistem pemidanaan untuk mendukung konsep keadilan restoratif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal menambah wawasan untuk kalangan akademisi maupun praktisi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Terutama ketika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sah dan diundangkan nantinya sehingga sanksi pidana kerja sosial mulai berlaku dan diterapkan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, berupa konsep pemikiran dan pemahaman kepada hakim, terdakwa, advokat, jaksa dan masyarakat di Indonesia terkait dengan penjatuhan pidana kerja sosial kepada seorang terdakwa.

3. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penulisan	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
1	Taufan Purwadiyanto, S.H	Analisis Pidana Kerja Sosial	1. Bagaimana keberadaan pidana kerja sosial dilihat dari	Penulisan hukum karya Taufan memiliki	Penulisan hukum karya Taufan mengkaji pidana kerja

⁴ Taufan Purwadiyanto, *Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia, Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015

		dalam Hukum Positif di Indonesia	<p>tujuan pemidanaan?</p> <p>2. Bagaimanakah bentuk pidana kerja social dalam perspektif ide pemsayarakatan?</p> <p>3. Bagaimanakah proses pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia?</p>	kesamaan yaitu hanya pada pembahasan mengenai pidana kerja social dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.	social dilihat dari tujuan pemidanaan dan ide pemsayarakatan. Pembahasan dalam jurnal tersebut hanya menguraikan mengenai pidana kerja social. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai prospek pidana kerja social lalu akan ditinjau dengan prinsip dari keadilan restorative.
2	G Widiartana	Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggula ngan Kejahatan dengan Menggunak an Hukum Pidana	<p>1. Jenis sanksi apakah yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan sesuai dengan paradigma Keadilan Restoratif ?</p> <p>2. Bagaimanakah proses penyelesaian kejahatan dapat dilakukan menurut paradigma Keadilan Restoratif ?</p>	Penulisan hukum karya G. Widiartana memiliki kesamaan yaitu pada pembahasan mengenai Keadilan Restoratif dalam hukum pidana.	Penulisan hukum karya G. Widiartana hanya membahas mengenai Keadilan Restoratif dalam hukum pidana. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai prospek pidana kerja social lalu akan ditinjau dengan prinsip dari keadilan restorative.

b. Kerangka Kerja Teoritis

1. Pemidanaan dalam Prespektif Teoritis

a. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya

kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*⁵, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen, yaitu:⁶

- a. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat;

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni,1992) Hal.11 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.Cit, Hal.17

⁷ Koswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1 (Bandung:Citra Aditya Bhakti:1995), Hal.12 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana

5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relative ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸

c. Teori Gabungan (Integratif)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:¹⁰

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op.Cit, Hal.16

⁹ Koeswadji, Op.Cit, Hal.11-12

¹⁰ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta:Gahlia Indonesia,1984), Hal.24 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.

d. Teori Treatment

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi kedalam masyarakat. . Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹¹

e. Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹²

2. Teori Tujuan Pemidanaan

a. Teori Absolut/Retributif

Teori ini bertolak dari suatu pemahaman bahwa setiap manusia mempunyai tanggung jawab secara absolut terhadap apa yang dilakukannya. Dalam wacana hukum pidana teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik tentang pemidanaan. Secara teoritis, teori ini merupakan teori balas dendam. Dalam pandangan teori absolut, setiap orang yang melakukan tindak pidana mutlak harus dipidana dan pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal dengan perbuatannya.

b. Teori Utilitarians

Teori ini pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap teori retribusi yang dianggap sangat klasik. Sistem pidana dan pemidanaan dalam teori retribusi yang dianggap tidak manusiawi menjadi inspirasi untuk terjadinya pergeseran paradigm dalam pemidanaan. Belajar dari teori tersebut yang cenderung hanya

¹¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2010), Hal.162-163

¹² Ibid

berorientasi pada perbuatan, teori utilitarian justru bertolak dari konsepsi punishment sebagai cara untuk mencegah dan mengurangi kejahatan.

Dalam perspektif utilitarian, pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap apabila dibuktikan bahwa dengan dijatuhkan pidana atau penderitaan itu menimbulkan akibat yang lebih baik daripada apabila tidak dijatuhi pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan bagi yang terlibat.

c. Pandangan Behavioral Prevention

Pandangan behavioral prevention merupakan pandangan yang bertitik tolak dari pertimbangan individu terpidana sendiri didalam penjatuhan pidana. Karenanya pandangan yang ketiga ini dianggap lebih sederhana. Pandangan ini memunculkan dua pemahaman teori dalam pemidanaan yaitu incapacity theory dan rehabilitation theory. Dalam incapacity theory, pidana dijatuhkan agar terpidana tidak lagi berada dalam kapasitas sebagai orang yang bebas melakukan kejahatan. Sementara menurut teori rehabilitasi, pemidanaan dijatuhkan agar proses pembinaan dapat dilakukan dengan mudah. Rehabilitasi dimaksudkan agar terpidana dapat merubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat melainkan menjadi orang baik.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik individual maupun social yang disebabkan oleh adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan social (individual and social damages). Berdasarkan teorinya tersebut, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat tujuan yang bersifat integrative tersebut meliputi :

1. Pencegahan
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbalan/pengimbangan

3. Keadilan Restoratif

Restoratif Justice merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributive, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Jika dalam teori retributive sanksi pidana

tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹³ Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁴

Restorative justice oleh banyak orang dilihat sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.¹⁵ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:¹⁶

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

¹³ Muladi dan Bardanawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni 1984), Hal.4

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Hal.53

¹⁵ Prof. M.Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Anak-Anak*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM RI : 2013)

¹⁶ Ibid

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restorative adalah:¹⁷

- a. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan;
- b. Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan
- c. Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban;
- d. Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin;
- e. Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukan;
- f. Merupakan tanggung jawab semua yang berkepentingan (stakeholders) untuk keadilan restorative melalui kemitraan melakukan tindakan;
- g. Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengalamannya dalam keadilan restorative.

Keadilan restorative bukan merupakan program khusus atau semacam *blueprint* untuk melakukan perubahan sistemik, tetapi lebih pada proses. Penerapan keadilan restorative memerlukan perubahan dalam pemikiran, pemahaman dan memberikan tanggapan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Menurut Dignan selain proses, hal yang juga penting adalah memperoleh hasil dari pendekatan melalui keadilan restorative, dan perlunya untuk menerapkan keadilan restorative dalam seluruh system peradilan pidana dan pembedaan.¹⁸

4. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan **“Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif”**. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari jurnal jurnal, buku buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan didalam tugas akhir ini meliputi :

¹⁷ M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012), Hal.17

¹⁸ Ibid, Hal.330

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal jurnal, buku buku, makalah, atau sumber lain yang berhubungan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah model studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative, kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif sistematis.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni pemilihan teori teori, asas asas, norma norma, doktrin dan pasal pasal dalam undang undang. Data yang dianalisis secara kualitatif tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukum atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Urgensi Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum). Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁹

Menurut Salman Luthan dan Muladi ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan dilakukannya pembaharuan hukum pidana.²⁰

1. Hukum pidana yang sudah ada sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan sosial dan keperluan masyarakat yang berkenaan. Hukum dan Undang-Undang itu tidak lagi relevan dengan keadaan sosial masyarakat yang hendak diaturnya, misalkan dengan wujud kejahatan baru;
2. Sebagian ketentuan dalam hukum pidana yang sudah ada, tidak sejalan dengan idea pembaharuan/reformasi yang membawa pada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, demokrasi dan nilai moral yang berkembang di masyarakat;
3. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana yang sudah ada mewujudkan ketidakadilan (*injustice*) dan bahkan merusak hak asasi manusia;
4. Hukum dan undang-undang pidana yang sudah ada sudah tidak bisa mengawal dan mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk mensesuaikan hukum pidana yang sedang berlaku dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pembaruan hukum pidana dimaksudkan agar substansi hukum pidana dapat menjelmakan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, sehingga efektif didalam penerapannya.

Apabila ditarik dalam garis hirarki yang lebih tinggi, maka berlakunya hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian secara yuridis formal, berlakunya hukum pidana di Indonesia sudah memperoleh dasar legitimasinya. Tuntutan keberlakuan yuridis hukum pidana belanda di Indonesia sudah terpenuhi. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa sekalipun suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan secara filosofis. Hal ini disebabkan hukum yang baik sekiranya dapat efektif diterapkan dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis, dan bahkan secara historis.²¹ Artinya secara yuridis, hukum tersebut harus sah, keberlakuannya didukung oleh masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hidup masyarakat

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Semarang:Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal.28-29

²⁰ Ibid

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung:Angkasa), 1996, Hal.160 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, Hlm.24

yang bersangkutan, serta memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat itu sendiri.

Urgensi pembaruan hukum pidana Indonesia juga dikemukakan oleh Sudarto²² yang mengemukakan adanya tiga alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yaitu:

1. Alasan politis

Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai hukum pidana yang bersifat nasional, yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Alasan sosiologis

Urgensi pembentukan hukum (pembaruan hukum pidana) nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional haruslah mencerminkan budaya masyarakat di Indonesia.

3. Alasan praktis

Alasan ini mengisyaratkan bahwa hukum nasional itu harus dipahami oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia secara resmi menggunakan Bahasa Belanda, sementara dalam perkembangannya sangat sedikit masyarakat khususnya penegak hukum yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda.

Pada kenyataannya saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini (KUHP) sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis saat ini serta hukum pidana Indonesia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Karena alasan itulah maka pembaruan hukum pidana nasional menjadi sangat urgent dan harus dikedepankan.

Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama adalah merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara factor objektif dan factor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental didalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (yang

²² Tongat, Op.Cit, Hal.25

merupakan asas kemanusiaan). Pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²³

Dalam perkembangannya, hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan khususnya, telah berkembang konsep untuk mencari alternative dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Upaya tersebut bertolak dari kenyataan bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun pertimbangan ekonomis. Atas pertimbangan kemanusiaan, pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai oleh karena jenis pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil dan tidak saja terhadap narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap narapidana antara lain:²⁴

1. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan (*Loos of Personality*).
2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Loos of Security*).
3. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah, sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Loos of Liberty*).
4. Dengan menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (*Loos of Personal Communication*).
5. Selama didalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (*Loos of Good and Service*).
6. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (*Loos of Heterosexual*).
7. Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya (*Loos of Prestige*).

²³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hal.94

²⁴ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djambatan), 1995, Hal.60 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, Hlm.4-5

8. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan akan rasa percaya diri (*Loos of Belief*).
9. Narapidana selama menjadi pidananya didalam lembaga pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (*Loos of Creatifity*).

Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan (*deterrence effect*) yang cukup andal. Terdapat berbagai permasalahan yang timbul dalam LAPAS, salah satunya yaitu Kondisi terbakarnya LAPAS Kelas 1 A Tanjung Gusta Medan,²⁵ dimana menambah catatan panjang persoalan yang terjadi di sekitar kehidupan LAPAS di Indonesia. Diantara permasalahan yang terjadi di LAPAS adalah keributan antar sesama narapidana, perlakuan para petugas LAPAS terhadap narapidana, pelarian narapidana, terjadinya pembunuhan sesama narapidana, perdagangan narkoba, pelecehan seksual dan berbagai persoalan-persoalan negatif lain yang sering terdengar dari balik jeruji besi tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut di atas sering mewarnai kondisi kehidupan di berbagai LAPAS di mana saja lebih khusus di Indonesia. Beberapa deprivasi yang dialami narapidana selama menjalani masa pemidanaan di LAPAS serta adanya subkultur narapidana merupakan penyebab timbulnya berbagai persoalan yang ada, misalnya proses prisosialisasi narapidana di LAPAS. Apabila pembicaraan diseputar narapidana dan LAPAS dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, maka pembicaraan berbagai deprivasi yang dialami para narapidana, proses prisonisasi, maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara yang masih berlangsung dan tetap ada di muka bumi ini. Setiap saat dan setiap waktu, selalu ada perubahan dan peristiwa di LAPAS.

Di samping itu sering terjadi, narapidana yang pada awalnya tidak begitu mengenal kehidupan kasar yang seharusnya diresosialisasi melalui pembinaan di LAPAS, namun setelah mejalani masa pemidanaan yang cukup untuk dapat menerima proses prisonisasi di LAPAS, ternyata mempunyai perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang keras dan kasar yang menjadi ciri utama sebagian besar subkultur narapidana. Sehingga sering

²⁵ Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

kita dengar bahwa LAPAS merupakan tempat sekolah bagi narapidana yang ingin ke jenjang kejahatan yang lebih tinggi.

Over capacity atau kelebihan tingkat hunian merupakan permasalahan utama yang dihadapi lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terutama di Pulau Jawa. Tingkat hunian yang sudah melebihi daya tampung ini sangat menyulitkan baik dalam segi pembinaan, pengawasan, maupun pemeliharaan sanitasi para warga binaan itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah untuk mengatasi tingkat kepadatan tersebut. Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).

Pidana penjara juga membawa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Lembaga permasyarakatan seringkali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan adanya hal tersebut maka pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena menimbulkan masalah yang semakin besar. Pidana penjara juga memberikan efek negatif berupa *dehumanisasi* dimana terpidana mendapat proses pengasingan dari masyarakat selama menjalani pidana perampasan kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu terpidana membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit atau sosialisasi dengan masyarakat untuk mengembalikan statusnya sebagai anggota masyarakat yang baik.

Permasalahan tersebut diatas menunjukkan bahwa suatu situasi yang sangat berbeda jauh dari tujuan dan cita-cita mulia yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukan LAPAS sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:²⁶

²⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hal 2

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan di atas tentu sangat jauh berbeda dengan melihat fakta dan realitas LAPAS saat ini.

Ditengah masa krisis dari pidana penjara tersebut, masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara dalam stelsel pidananya. Namun disamping pidana penjara tetap dipertahankan, diimbangi pula dengan usaha untuk mencari bentuk alternatif pidana penjara yang disertai pula dengan kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penerapannya serta memperbaiki pelaksanaannya. Indonesia yang juga tetap mempertahankan pidana penjara, tidak luput pula dari usaha-usaha untuk melakukan pembaruan.

Sementara itu terjadinya transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia pada umumnya dari konsep retribusi kearah konsepsi reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. Pada tatanan konseptual ini, patut kiranya digaris bawahi bahwa saat ini konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan (*punishment to*

punishment) telah ditinggalkan. Konsepsi baru yang dianut adalah konsep pembinaan (*treatment philosophy*).

Terjadinya pergeseran konsep pemidanaan, secara stimulan telah menjadi dasar pemikiran yang sangat tepat dalam upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Kecenderungan untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga bertolak pada kenyataan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan sangatlah besar. Besarnya biaya tersebut antara lain adalah untuk biaya hidup narapidana seperti makan, pakaian, dan sebagainya yang dari waktu ke waktu menunjukkan angka yang relatif besar. Pertimbangan ekonomi tersebut semakin menjadi dilema oleh karena berbagai kritikan terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk meningkatkan biaya hidup narapidana di lembaga pemasyarakatan sering kali dipahami secara tidak adil.

Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan lahirnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena timbulnya ancaman yang lebih besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama masyarakat kehilangan kemerdekaannya. Selain kurang efektifnya sanksi pidana yang diterapkan, ada faktor lain yang muncul dari pelaku yaitu tidak adanya rasa malu yang dimiliki oleh para pelaku setelah melakukan kejahatannya. Justru semakin menambah keberanian pelaku untuk bertindak, tanpa memperhatikan rasa bersalah dan malu yang telah diperbuatnya.

Bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang melakukan pembaruan hukum pidana, hal itu juga dilatar belakangi oleh kecenderungan Internasional yang juga melakukan pembaruan hukum pidana. Kecenderungan tersebut bahkan sudah ditransformasikan kedalam konsep pembaruan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual dalam hukum pidana itu terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja social dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diadopsinya pidana kerja social dalam system hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana Indonesia yang tidak saja berorientasi pada perbuatan, namun juga berorientasi pada pelaku sekaligus (*daad dader strafrecht*).

b. Konsepsi Pidana Kerja Sosial sebagai Pengembangan Sistem Pemidanaan Untuk Mendukung Konsep Keadilan Restoratif

Kongres ICOPA ke12 yang mengamanatkan kepada negara-negara di dunia untuk memasukkan alternatif pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, ditindaklanjuti dengan Resolusi PBB pada Desember 1990 yang telah menetapkan “*Tokyo Rule*” yang berisi tentang “*Standart Minimum Rules for non custodial measyres*” (*SMR for non custodial*). Tindakan *non custodial*, yakni tindakan tidak menempatkan pelaku tindak pidana dalam suatu lembaga, sehingga tidak terjadi perampasan kemerdekaan dapat diterapkan dalam setiap tahap pada proses peradilan pidana, yakni pada saat pra peradilan (penyidikan dan penuntutan), proses peradilan (pemeriksaan di pengadilan) maupun pasca peradilan (pelaksanaan putusan pengadilan).²⁷

Alternatif pidana penjara “*alternative imprisonment/ alternativeto custodial sentences*” terjadi pada pemeriksaan di pengadilan pada saat hakim sebagai pejabat yang berwenang memidana “*sentencing authorities*” menjatuhkan pidana, yang menurut “*Tokyo Rules*” dapat berupa:

1. Sanksi lisan (*verbal sanctions*) yang terdiri dari:
 - a. Teguran/nasihat (*admonition*),
 - b. Teguran keras/pencercaan (*reprimand*),
 - c. Peringatan (*warning*).
2. Pelepasan bersyarat (*conditional discharge*).
3. Pidana status (*status penalties*).
4. Sanksi ekonomi (*economic sanctions*) dan pidana berupa uang (*monetary penalties*).
5. Perampasan (*confiscation*) dan pengambil alihan (*expropriation order*).
6. Ganti rugi dan pembayaran kompensasi (*restitution and compensation*).
7. Pidana bersyarat (*suspended sentence*).
8. Pengawasan (*probation/judicial supervision*).
9. Pidana/perintah kerja sosial (*a community service order*).
10. Penyerahan ke pusat kehadiran (*referral to an attendance centre*).
11. Penahanan rumah (*house arrest*).
12. Perawatan non-institutional (*non institutional treatment*).
13. Kombinasi.

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara etimologis, maka secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melanjutkan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*.²⁸

²⁷ Iskandar Wibawa, *Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol.24 No.2 / Desember 2017

²⁸ Tongat, Op.Cit, Hal.7

Secara teoritis pidana kerja social mengandung beberapa dimensi sebagaimana yang terurai dibawah ini:²⁹

1. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kerja sosial jangka pendek.

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial, yaitu upaya untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuan pidana bersyarat kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama, yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Artinya, pidana kerja social hanya akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar.

Di beberapa negara seperti Italia, Jerman dan Swiss, pidana kerja sosial dapat mengganti pidana penjara pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana dendanya. Jadi apabila ada seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti. Pada pelaksanaannya, pidana penjara pengganti (denda) inilah yang dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.

3. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi.

Beberapa negara di Eropa, pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melaksanakan pidana kerja sosial. Demikian pula di Jerman, pidana kerja social dapat menjadi alternative pidana perampasan kemerdekaan sebagai akibat denda tidak terbayar dengan melalui grasi.

Dalam perkembangannya, pidana kerja social ini bahkan dapat menjadi syarat untuk dapat dilakukan pelepasan bersyarat bagi narapidana. Perkembangan ini sudah terjadi di Jerman berdasarkan Pasal 153a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman. Selain berbagai dimensi pidana kerja social tersebut diatas, maka perlu ditegaskan bahwa tidak dalam semua klasifikasi tindak pidana dan karenanya juga tidak dalam setiap jenis pidana dapat diterapkan pidana kerja social. Pidana kerja social hanya dapat diterapkan atau dijatuhkan dengan syarat syarat tertentu.

²⁹ Ibid, Hal 8

Pidana kerja social merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana diluar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan social. Jenis pidana kerja social ini merupakan jenis pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun diluar KUHP. Wacana tentang pidana kerja social sebagai salah satu jenis pidana sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat ditemukan karena telah berulang kali dilakukan proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dasar pembeda digunakannya suatu jenis pidana dalam suatu system hukum pidana yang berlaku adalah tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam system hukum pidana itu. Artinya sejauh mana tujuan pemidanaan yang ditetapkan itu dipenuhi oleh pidana yang bersangkutan. Oleh karenanya, untuk melihat apakah pidana kerja social relevan dengan system hukum pidana Indonesia sekaligus sebagai alternative dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, maka haruslah dilihat sejauh mana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan.

Tujuan pemidanaan dalam system hukum pidana di Indonesia belum dirumuskan secara formal didalam undang-undang, maka tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai relevansi pidana kerja social sebagai alternative pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana lebih bersifat teoritis. Namun demikian, didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 55 menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Melihat Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka tujuan pemidanaan diarahkan pada pemasyarakatan atau menjadikan terpidana dapat kembali menjadi masyarakat yang lebih baik dan bertanggungjawab, dengan menghindari pelaksanaan hukuman dengan tujuan membuat jera sebagaimana dikatakan dalam teori retributif atau teori pembalasan.

Sebagai upaya memaksimalkan pidana kerja social dalam alternatif system pemidanaan maka perlu dianalisis menggunakan berbagai sudut pandang teori pemidanaan yang ada. Analisis berdasarkan teori retributif, bahwa pemidanaan itu

dilakukan dalam rangka memberikan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku agar dia menjadi jera. Sebagaimana sudah diulas diatas bahwa pidana kerja social dimasukan sebagai salah satu pidana pokok, konsekuensi dari penempatan pidana kerja social sebagai pidana pokok, maka jenis pidana ini bersifat imperative dan tidak boleh ada penjatuhan dengan dua jenis pidana pokok secara bersamaan karena jenis pidana ini harus menjadi pilihan diantara jenis pidana pokok yang lain dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pidana kerja social dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal hal yang bermanfaat.³⁰ Karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.³¹ Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan (*deterrence effect*) yang cukup andal.

Upaya untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah berlangsung sejak lama yang dilakukan dalam kerangka politik kriminal. Perkembangan upaya untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan juga diwarnai dengan munculnya perbedaan konseptual berkaitan dengan makna dan hakikat alternatif pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri. Dalam konteks ini muncul pemahaman, yaitu:³²

1. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*alternative to custodial sentence*) diartikan sebagai *alternative sanctions*, yaitu sanksi yang dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan (*sanction which can replace custodial sentence*). Sanksi ini hanya diterima apabila dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan diartikan sebagai usaha mencapai tujuan alternatif (*alternative goals*) yang tidak dapat dicapai dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan kata lain dapat dinyatakan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan berada pada tujuan yang salah. Tujuan akhirnya adalah menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dengan system yang disebut *non-punitive measure*. Dengan demikian *alternative sanctions* diartikan sebagai alternatif obyektifes.

³⁰Penjelasan Pasal 65 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni), 1992, Hal.5

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Universitas Diponegoro), 1995, Hal.139 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, Hlm.14

Pada awalnya, pidana kerja social dalam bentuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghindari pidana perampasan kemerdekaan berkembang di negara-negara Eropa. Di Jerman misalnya, sejak abad pertengahan seorang terpidana denda yang tidak mampu membayar denda yang ditetapkan maka diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kehidupan masyarakat banyak seperti membersihkan kanal-kanal atau membangun tembok-tembok kota. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada akhir abad sembilan belas dan pada permulaan abad dua puluh, pidana kerja social sebagai alternatif pidana denda atau pidana perampasan kemerdekaan mulai dicantumkan dalam perundang-undangan pidana di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Italy, dan Norwegia.³³ Namun demikian, sampai pada permulaan abad dua puluh, pidana kerja social sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan masih menampilkan dirinya sebagai kerja paksa (*force labour*). Sekalipun dilakukan dengan tanpa perampasan kemerdekaan, *work as penalty* dengan ciri tersebut diatas lebih memperlihatkan sebagai kerja paksa daripada sebagai kerja social.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat, kerja social sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan diperbarui hingga meninggalkan sifat aslinya sebagai *force labour*. Pidana kerja social saat ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa dengan menggunakan cara yang sangat manusiawi sehingga menampilkan dirinya sebagai *avoluntarily undertaken obligation*, sesuai dengan latar belakang kelahirannya sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang cenderung bersifat keras bahkan memaksa. Pengaturan mengenai pidana kerja social saat ini di Indonesia ada pada Pasal 88 RKUHP, yaitu:

1. Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
2. Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. Riwayat sosial terdakwa;
 - e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

³³ Ibid, Hal.138

- a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
 6. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
 7. Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan:
 - a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan atau dijatuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Merujuk pada pendapat Muladi³⁴ berbagai syarat yang dapat memungkinkan penjatuhan pidana kerja sosial antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Yang berkaitan dengan tindak pidana

Secara umum khususnya di negara-negara Eropa yang sudah menerapkan jenis pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu. Umumnya negara tersebut mempersyaratkan, bahwa pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Selain itu pada umumnya pidana kerja sosial diterapkan terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda (*Crimes against property*) dengan syarat, bahwa pidana penjara yang akan diterapkan tidak melebihi waktu tertentu (Denmark 6-8 bulan, Norwegia dan Luxemburg 9-12 bulan, Belanda dan Portugal 4 bulan).

Persyaratan lain yang mungkin ditetapkan berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku. Berkaitan dengan usia pelaku, penerapan pidana kerja sosial juga harus mempertimbangkan adanya larangan bagi pelaku yang masih dibawah umur yang berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk bekerja. Sementara berkaitan dengan catatan kejahatan pelaku, pidana kerja sosial pada umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai *criminal record* yang tidak baik. Di Prancis misalnya, pidana kerja sosial tidak akan diterapkan terhadap para residivis.

- b. Jumlah jam pidana kerja sosial

³⁴ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Hal.141 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Berkaitan dengan ketentuan minimum pidana kerja social, terdapat berbagai variasi ketentuan. Di Portugal pidana kerja social minimum dilakukan dalam waktu 9 jam. Sementara di Denmark, Prancis dan Inggris pidana kerja social minimum 40 jam. Sedangkan di Norwegia pidana kerja social dilakukan dengan minimum 50 jam.

Berkaitan dengan ketentuan maksimum pidana kerja social, ketentuan diberbagai negara juga menunjukkan adanya variasi pengaturan. Di Portugal pidana kerja social dapat diterapkan dengan maksimum 180 jam. Sementara di Denmark dan Norwegia maksimum pidana kerja social adalah 200 jam. Sedangkan di Prancis, Belanda dan Inggris pidana kerja social dapat diterapkan untuk maksimum 240 jam.

c. Persetujuan terpidana

Persetujuan pidana dalam penerapan pidana kerja social dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan berbagai konstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (*force labour*). Sementara disisi lain, adanya persetujuan dari terpidana tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja social.

d. Isi pidana kerja social

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja social di Pengadilan hanya menetapkan jumlah jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi. Sementara pelaksanaannya secara teknis, misalnya berkaitan dengan tempat dimana pidana kerja social harus dijalani, berapa jam terpidana harus menjalani pidana kerja social dalam setiap harinya dan sebagainya harus dilakukan oleh *probation service*.

e. Kegagalan menjalani pidana kerja social

Jika seorang terpidana gagal menjalani pidana kerja social, maka kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana. Akibat tersebut dapat berupa:

1. Apabila pidana kerja social tersebut berupa pidana yang mandiri maka akibat kegagalan terpidana menjalani pidana kerja social dapat dijatuhi denda sampai batas tertentu (Inggris \$100), mengulangi lagi pelaksanaan pidana kerja social atau dikenakan pidana alternative yang lain. Bahkan di Prancis kegagalan pidana kerja social dikualifikasikan sebagai tindak pidana sendiri yang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan antara 2 bulan – 2 tahun. Sementara di Belanda kegagalan menjalani pidana kerja social dapat dikonversi menjadi pidana sampai 6 bulan dan di Portugal sampai dengan 3 bulan.
2. Apabila pidana kerja social ditetapkan dalam kaitannya dengan pidana bersyarat (*suspended sentence*), maka kegagalan terpidana menjalani pidana kerja social dapat

mengakibatkan diterapkannya pidana penjara yang ditunda seperti yang berlaku di Belanda, Noewegia dan Prancis. Akibat kegagalan tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi pidana kerja social tersebut.

Dalam menjalankan pidana kerja social, terpidana dituntut bekerja keras selama menjalani masa pemidanaan. Sedangkan secara teoritis pidana kerja social sesuai dengan ajaran integrasi. Menurut teori integrasi, dalam pemidanaan memerlukan adanya pemilahan dan pembedaan antara tahap-tahap pemidanaan narapidana serta berat ringannya tindak pidana karena teori ini mengintegrasikan antara unsur pembalasan dengan unsur tujuan atau prevensi. Sehingga dengan pidana kerja social ini akan mampu menjadi unsur balasan sekaligus pencegahan agar keadaan para terpidana ini tidak semakin buruk setelah masuk penjara.

Restorative justice dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*.³⁵ Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Konsep teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, mengilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Keadilan restorative adalah paham keadilan hukum klasik yang memberi balasan hukuman setimpal bagi pelaku tindak pidana oleh negara hingga pihak yang dirugikan mendapat kompensasi bagi kerugian yang ia alami. Pemidanaan restoratif dalam sistem peradilan adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tidak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan kepada korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil restorasi kemanusiaan oleh pelaku tindak pidana dalam wujud perbaikan riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan, atau santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ikhlas sikap taubat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban. Dengan

³⁵ Darrel Fox, *Social Welfare and Restorative Justice*, Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, Hal.56

demikian, pembedaan restorative menekankan pada restitusi oleh pelaku kepada korban daripada retribusi kepada negara.³⁶

Pembedaan restorative telah membawa pandangan baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yaitu:³⁷

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi kepada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan public dan kepentingan korban merupakan bagian utama dari kepentingan public ini.
3. Yang menjadi korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan, terutama korban langsung, masyarakat, negara dan sesungguhnya juga pelaku itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan menyelesaikan konflik.
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelaku merupakan bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan beserta akibatnya.
6. Korban, masyarakat, negara dan pelaku dalam proses peradilan pidana berperan aktif.

Dengan demikian, pembedaan restoratif merupakan cara baru untuk melihat peradilan pidana yang memfokuskan pada penyembuhan luka yang diderita dan hubungan daripada menghukum pelaku. Tujuan model restorative dalam sistem peradilan pidana adalah keadilan yang komprehensif dengan memberikan perhatian kepada semua pihak yang berkepentingan yakni korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan negara. Sasaran pembedaan tersebut adalah memberi perhatian yang lebih besar kepada kepentingan semua pihak, karena terjadinya kejahatan tidak hanya merugikan dan membawa akibat kepada korban semata-mata, tetapi juga masyarakat, negara, bahkan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Pembedaan restoratif telah berkembang sebagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju dan berkembang (*developed and developing states*). Konsep keadilan restorative bukan merupakan gagasan baru dalam kriminologi atau dalam menangani kejahatan. Nilai-nilai, prinsip dan penerapan keadilan restorative dapat ditelusuri dari berbagai budaya penduduk asli di seluruh dunia di Amerika Serikat, Canada (Aboriginal), Selandia Baru (Maori), Hawaii, Afrika, Arab, Indonesia, dan Asia. Nilai-nilai keadilan restorative

³⁶ Peggy Hutchison and Harmon Wray, *What is Restorative Justice?*, dalam buku M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012), Hal.314

³⁷ M.Hatta Ali, Op.Cit, Hal.315

tersebut juga telah berakar dalam ajaran agama semawi, yakni bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan keluarganya, bukan kepada negara. Filosofi keadilan restorative mencakup sifat-sifat manusia secara keseluruhan, termasuk penyembuhan, memaafkan, berterima kasih, mediasi, rekonsiliasi dan pemberian sanksi (jika dianggap pantas).³⁸

Pemidanaan restoratif adalah memandang kedepan (*forward looking*) dan merupakan tanggapan yang bersifat preventif untuk memahami kejahatan dalam konteks social. Pemidanaan restorative ini berdasarkan asumsi bahwa kejahatan bermula dari keadaan social, dan mengakui bahwa pelaku tindak pidana juga terluka. Oleh karena itu, masyarakat harus mengambil alih tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi tersebut yang telah memicu timbulnya kejahatan dan juga bekerja untuk menyembuhkannya.³⁹ Pemidanaan restorative dalam perkembangan sistem hukum pidana, menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran retributisme, negara mengambil alih peranan penuntutan yang menjadi hak korban dengan lasan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian setiap tahap dalam sistem peradilan pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili.

Berbeda dengan pandangan retributivisme, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restorative memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dengan korbannya. Presepsi tentang kejahatan menurut keadilan restorative tersebut mengandung konsekuensi harus dipertimbangkannya juga aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Keadilan restorative juga memandang penting dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara.

³⁸ J. Considine, *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*

³⁹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, London, dalam buku M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012), Hal.318

Dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembaruan hukum pidana adalah untuk menghadirkan individualisasi pemidanaan yang mendukung tujuan pemidanaan prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restorative dan alternative terhadap pidana penjara.⁴⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa semangat penyusunan RKUHP ditujukan untuk mendukung diterapkannya pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung keadilan restorative justru tidak tergambar dalam rumusan tindak pidana dalam RKUHP, justru dalam Buku II RKUHP terdapat peningkatan sanksi pidana dan jenis tindakan yang bisa dipidana. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya perbuatan yang dikriminalisasi melalui RKUHP, seolah-olah setiap permasalahan di masyarakat harus diselesaikan dengan hukum pidana. Jika benar RKUHP mendukung keadilan restorative, maka rumusan RKUHP seharusnya mengedepankan peran korban dalam penyelesaian tindak pidana. Namun sayangnya, semangat tersebut tidak nampak dalam rumusan RKUHP. RKUHP disusun dengan tidak melibatkan korban, bahkan dalam beberapa pasal justru merugikan korban serta berpotensi viktimogen, viktimisasi, dan reviktimisasi. Korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang seimbang dan partisipasi korban hanya dijadikan sebagai alat bukti tanpa memposisikan korban sebagai subjek dalam penyelesaian tindak pidana.

Rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memasukan beberapa alternative pemidanaan untuk mendukung konsep keadilan restorative sebagai upaya penanganan masalah *overcrowding* Rumah Tahanan dan Lapas yang saat ini sudah mencapai kondisi yang ekstrim. Penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas penjara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Seharusnya rumusan alternative pidana dalam Rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjawab dan mengatasi permasalahan ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan 3 (tiga) bentuk alternative pemidanaan, yakni pidana kerja social, pidana denda, dan pidana pengawasan. Pidana kerja social adalah bentuk pemidanaan paling baru yang diperkenalkan oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan persyaratan umum yang lebih khusus dibandingkan dengan pidana pengawasan yaitu untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimal 5 (lima) tahun penjara disertai penjatuhan pidana oleh hakim maksimal 6 (enam) bulan penjara.

⁴⁰ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2015, Hal.256

Perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan alternative pemidanaan hanya berdasarkan ancaman pidana dan putusan hakim nampaknya tidak sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa alternative pemidanaan harusnya diputuskan berdasarkan pendekatan individualisasi pidana yang memeriksa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana yang dipertemukan dengan kebutuhan korban tindak pidana, bukan semata-mata pembatasannya didasarkan pada pengaturan ancaman pidana.

Jika dilihat dari isi Pasal 88 RKUHP maka, dalam pertimbangan penjatuan pidana kerja social terlihat bahwa tidak mencantumkan peran korban yang sebenarnya poin tersebut merupakan poin yang terpenting dalam konsep keadilan restorative. Permasalahan lainnya yang terlihat dari konsekuensi apabila pidana kerja social tidak dapat dijalankan dengan baik, terpidana tetap akan berujung pada penjara. Penjatuan pidana kerja social hanya sebatas menunda pelaksanaan pidana penjara, bukan dimaksudkan untuk mencapai keadilan restoratif yang menggali kebutuhan masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa. Selain tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang sebenarnya, pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Pasal 88 juga tidak sesuai dengan konsep tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yaitu:

Pasal 55

1. Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*
- 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Pasal 56

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;*
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;*
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;*
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;*
- e. cara melakukan tindak pidana;*
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;*
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;*
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;*
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;*
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau*

- k. *pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.*
2. *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Dibawah ini akan dikemukakan seberapa jauh pidana kerja social dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan, sehingga karenanya pidana kerja social memang relevan diterapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Relevansi pidana kerja social dengan aspek tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Aspek perlindungan masyarakat.

Pidana kerja social merupakan alternative pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Alternative tersebut dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari penerapan pidana perampasan jangka pendek. Pidana kerja social diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana, dan sebagainya.

Sebagai alternative pidana perampasan jangka pendek, pidana kerja social mempunyai beberapa keunggulan antara lain:

1. Pidana kerja social sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan.
2. Pidana kerja social akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan” oleh penjahat”.
3. Dilihat dari prespektif ekonomi, pidana kerja social juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan.

b. Aspek perlindungan individu.

Dilihat dari aspek perlindungan individu, pidana kerja social banyak memberikan harapan besar sebagai suatu jenis pidana, terlebih lagi jika dikaitkan dengan falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang sangat berorientasi kepada individu pelaku tindak pidana. Dengan adanya pidana kerja social seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan, antara lain:

1. Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. Stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga terpidana tetap mempunyai kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
2. Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan

⁴¹ Ibid

ini memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan masyarakat.

3. Pidana kerja sosial dapat menghindari “dehumanisasi” yang selalu menjadi efek negative dari pidana perampasan kemerdekaan.

Berhasilnya pembinaan individu terpidana disatu sisi akan memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Sementara disisi lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan. Dengan melihat kedua aspek perlindungan tersebut beserta relevansinya dengan pidana kerja sosial maka dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial sebagai alternative pidana yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP sangat relevan. Pilihan terhadap pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Model pidana kerja sosial harus disesuaikan dengan *Ius Constituendum* (hukum yang berlaku saat ini). Sebagai bahan perbandingan agar sanksi pidana kerja sosial menjadi lebih sempurna, perlu kiranya mencontoh praktek sanksi pidana kerja sosial yang berada di negara lain. Di Belanda menempatkan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana pokok, Polandia menempatkan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok, sedangkan Perancis juga sebagai jenis pidana pokok. Konsep sendiri menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Sehingga sanksi pidana pokok dalam konsep itu sendiri sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek bukan jenis sanksi tindakan maupun tambahan. Karena pada dasarnya sanksi pidana kerja sosial tergolong jenis pidana yang ringan atau sedang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pengertian pidana kerja sosial, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kerja sosial, pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, serta syarat-syarat tertentu menjatuhkan pidana kerja sosial perlu di jelaskan lebih rinci agar tidak memberikan perbedaan persepsi bagi penegak hukum maupun para pelaku sanksi tersebut.

Pidana kerja sosial sebagai upaya alternatif pidana perampasan kemerdekaan, diharapkan dapat menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana dan dapat menghindarkan terpidana dari dampak negative seperti perilaku yang semakin buruk setelah menyelesaikan masa hukuman, adanya pemikiran negatif masyarakat yang menganggap terpidana adalah orang jahat sehingga terpidana tidak dapat bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat dan tidak dapat menutup kemungkinan terpidana tersebut untuk kembali melakukan kejahatan. Keberadaan pidana kerja sosial bagi terpidana diharapkan juga mampu membuat terpidana tersebut hidup secara normal didalam masyarakat. Hal

tersebut merupakan beberapa tujuan dari dimunculkannya alternative pemidanaan pidana kerja sosial, oleh karena itu jika konsep atau pedoman penjatuan pidana kerja sosial masih sama seperti yang ada dalam Pasal 88 RKUHP, maka tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam Pasal 55 tidak sepenuhnya tercapai dan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif seperti yang terdapat dalam Naskah Akademik RKUHP.

6. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan social, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut.
2. Pidana kerja sosial (*community service order*) diatur dalam Pasal 88 RKUHP yang merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat menjadi alternative dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal hal yang bermanfaat. Karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan (*deterrence effect*) yang cukup andal.
3. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal hal yang bermanfaat. Dalam Naskah Akademik RKUHP dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembaruan hukum pidana adalah untuk menghadirkan individulisasi pemidanaan yang mendukung tujuan pemidanaan prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif terhadap pidana penjara. Sehingga dapat dikatakan bahwa semangat penyusunan RKUHP ditujukan untuk mendukung diterapkannya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.

7. Saran

Dari kesimpulan terkait Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya dengan Konsep Keadilan Restoratif yang telah Penulis uraikan diatas maka Penulis memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Model pidana kerja sosial harus disesuaikan dengan *Ius Constituendum* (hukum yang berlaku saat ini). Karena pada dasarnya sanksi pidana kerja sosial tergolong jenis pidana yang ringan atau sedang. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah pengertian pidana kerja sosial, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kerja sosial, pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kerja sosial, serta syarat-syarat tertentu menjatuhkan pidana kerja sosial perlu di jelaskan lebih rinci agar tidak memberikan perbedaan persepsi bagi penegak hukum maupun para pelaku sanksi tersebut agar supaya konsep pidana kerja social dapat sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang ideal.
2. Pidana kerja sosial sebagai upaya alternatif pidana perampasan kemerdekaan, diharapkan dapat menekan biaya ekonomi pelaksanaan pidana dan dapat menghindarkan terpidana dari dampak negatif seperti perilaku yang semakin buruk setelah menyelesaikan masa hukuman, adanya pemikiran negatif masyarakat yang menganggap terpidana adalah orang jahat sehingga terpidana tidak dapat bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat dan tidak dapat menutup kemungkinan terpidana tersebut untuk kembali melakukan kejahatan. Keberadaan pidana kerja sosial bagi terpidana diharapkan juga mampu membuat terpidana tersebut hidup secara normal didalam masyarakat. Hal tersebut merupakan beberapa tujuan dari dimunculkannya alternative pemidanaan pidana kerja sosial, oleh karena itu jika konsep atau pedoman penjatuhan pidana kerja sosial masih sama seperti yang ada dalam Pasal 88 RKUHP, maka tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam Pasal 55 tidak sepenuhnya tercapai dan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif seperti yang terdapat dalam Naskah Akademik RKUHP.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2010)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta:Pradnya Pramita,1993)
Hal.26 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994)
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djambatan), 1995, Hal.60 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung:PT. Rafika Aditama, 2009
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Djambatan, 1995)
- J. Considine, *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung:Angkasa), 1996, Hal.160 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001
- John Braithwaite and Heather Strang, *Restorative Justice and Civil Society* 166 (2001). Dalam jurnal Nefa Claudia Meliala, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Koswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1 (Bandung:Citra Aditya Bhakti:1995), Hal.12 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana
- M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012)
- Mark Umbreit, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime* edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave 213 (Criminal Justice Press, New York, 1999). Dalam jurnal Nefa Claudia Meliala, Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, (Malang:Setara Press, 2014)

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni,1992) dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Bardanawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni 1984)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Universitas Diponegoro), 1995, Hal.139 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Hal.141 dalam buku Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni), 1992
- Paul McCold and Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute for Restorative Practices, Makalah disajikan dalam the XIIIth. World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, <http://www.realjustice.org/library/paradigm.html> (1 of 5), dalam buku M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012)
- Peggy Hutchison and Harmon Wray, *What is Restorative Justice?*, dalam buku M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012)
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta:Gahlia Indonesia,1984), Hal.24 dalam Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.
- Prof. M.Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Anak-Anak*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM RI : 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980)
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, London, dalam buku M.Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung : PT.Alumni, 2012)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Semarang:Kencana Prenanda Media Group, 2008)

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Darrel Fox, *Social Welfare and Restorative Justice*, Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences

G Widiartana, *Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Iskandar Wibawa, *Pidana Kerja Sosial dan Restitusi sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol.24 No.2 / Desember 2017

Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

Jurnal Ilmu Hukum Usman (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.

Nefa Claudia Meliala, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*.

Taufan Purwadiyanto, *Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015